

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Responsivitas merupakan kemampuan lembaga atau organisasi termasuk aparatur di dalamnya untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan berbagai program pelayanan baru sesuai pengetahuan dan tuntutan baru terkait waktu, akses dan komunikasi, juga bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, serta menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas sangatlah bergantung pada aspek-aspek sebagai berikut, yaitu pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan dari sumber daya manusia, dalam hal ini peningkatan dari kualitas pelayanan publik yang dimaksud disini yaitu penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan meliputi penetapan kebijakan pembangunan wilayah yang berisiko mengakibatkan timbulnya bencana. Bencana merupakan sebuah kejadian atau susunan kejadian bersifat mengganggu dan mengancam kehidupan sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, alam, non – alam, dan ulah manusia yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan korban jiwa.

Berbagai macam gerakan reformasi publik atau public reform yang dirasakan oleh negara-negara maju pada awal 1990-an banyak diilhami dari tekanan masyarakat akan perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik yang

di laksanakan oleh pemerintah. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak mendapat kualitas pelayanan yang sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan (Pasal 18). Permasalahan yang paling utama pada pelayanan publik yaitu berkaitan dengan peningkatan dari kualitas pelayanan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan Bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 6 ayat (4) penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

- a. BNPB untuk tingkat nasional;
- b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
- c. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 maka diharapkan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah akan lebih efektif dan efisien. Lembaga badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No 7 tahun 2010 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten Aceh Tamiang.

Banjir yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang ini menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur, rumah, dan fasilitas publik, perkebunan,

pertanian dan mengakibatkan gangguan pada ekonomi, memutuskan arus transportasi antara Sumatra-Aceh hingga menyebabkan macet dan gangguan transportasi yang berkepanjangan, menghilangkan sumber daya alam, dan menyebabkan kerugian jiwa dan cedera.

Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) mencatat kerugian yang dialami Aceh Tamiang pada bulan Oktober 2022 akibat banjir sepekan, yakni mencapai Rp200 miliar. Angka ini merupakan total kerugian yang dialami oleh 12 kecamatan yang terdiri dari 149 Kampung yang terendam banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, jadi angka Rp200 miliar itu meliputi kerusakan rumah, jalan, jembatan, tanggul sungai, areal pertanian, mobiler sekolah, dan lain-lain. belum lagi kerugian sektor ekonomi dampak terputusnya akses jalan Nasional lintas Provinsi Medan-Banda Aceh, dalam mengatasi dampak buruk banjir diatas, diperlukan responsivitas yang baik dari lembaga yang ditugaskan untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 1.1
Jumlah kecamatan dan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang yang terendam banjir tahun 2022

No	Kecamatan	Kampung
1.	Bandar Pusaka	13
2.	Sekrak	9
3.	Kota Kuala Simpang	4
4.	Tenggulun	4
5.	Tamiang Hulu	5
6.	Bendahara	27
7.	Kejuruan Muda	14
8.	Seruway	10
9.	Karang Baru	22
10.	Manyak Payed	22
11.	Rantau	9
12.	Banda Mulia	10
Jumlah	12 Kecamatan	149 Kampung

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Tamiang 2023

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 kecamatan terdiri dari 213 Kampung, di 12 kecamatan tersebut secara menyeluruh terdapat sebanyak 149 Kampung yang terendam banjir pada tahun 2022 di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian responsivitas badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang dinilai belum sepenuhnya dapat di atasi dengan baik oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah pengungsi tercatat di tahun 2022 sebanyak 109.890 jiwa.

Adapun data logistik yang di salurkan pada saat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022 dimana bantuan logistik di salurkan ke setiap kecamatan di karenakan pihak kecamatan lah yang lebih mengetahui wilayah dan kondisi masyarakat nya yang terdampak.

Table 1.2. Data jumlah penyaluran logistik di setiap kecamatan pada saat bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang 2022

No	Kecamatan	Jumlah desa yang terendam banjir	Jumlah masyarakat yang terdampak banjir	Jumlah logistik yang tersalurkan	
				Jenis bantuan	
				Pangan	Obat-obatan
1.	Tamiang Hulu	5	420 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.932 kg Beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
2.	Bandar Pusaka	13	600 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.940 kg beras ▪ 25 Dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 20 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
3.	Sekrak	9	460 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3156 kg Beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	di butuhkan oleh para korban banjir
4.	Karang Baru	22	1258 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.624,8 kg Beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 37 dus mie instan ▪ 31 papan telur ▪ 20 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
5.	Manyak Payed	22	620 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.052 kg beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 37 dus mie instan ▪ 31 papan telur ▪ 20 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
6.	Seruway	10	520 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.492 kg Beras ▪ 25 Air mineral ▪ 33 dus Mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
7.	Kejuruan Muda	14	720 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.612 kg beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
8.	Bendahara	27	458 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.184 kg beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
9.	Rantau	9	1.120 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6.852 kg Beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
10.	Banda Mulia	10	740 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.726 kg beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	di butuhkan oleh para korban banjir
11.	Tenggulun	4	423 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.779,4 kg beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
12.	Kota Kuala Simpang	4	727 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.651 kg beras ▪ 25 dus air mineral ▪ 33 dus mie instan ▪ 29 papan telur ▪ 16 dus minyak goreng 2 liter 	25 paket P3K lengkap dengan obat-obatan yang di butuhkan oleh para korban banjir
Jumlah	12 kecamatan	149 desa	8066 Jiwa	52.002 Kg Beras 300 dus air mineral 396 dus mie instan 348 papan telur 192 dus minyak goreng uk 2 liter	300 peket P3K

Sumber: data olahan peneliti dari Dinsos Kabupaten Aceh Tamiang 2024

Untuk data dari Dinas sosial Kabupaten Aceh Tamiang yang telah peneliti paparkan merupakan bantuan khusus dari pemerintah yang di salurkan langsung oleh dinas sosial logistik tersebut belum termaksud logistik yang di berikan oleh pihak ke tiga yang langsung di berikan oleh pihak-pihak ke tiga langsung kepada korban banjir, maka data logistik tidak termaksud ke dalam data yang di salurkan oleh dinas sosial.

Temuan peneitian pada saat melakukan observasi di lapangan mengenai banjir tahunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Kabupaten Aceh Tamiang terdapat sungai yang terbentang yang sering di sebut Sungai Temiang dimana sungai tersebut memeiliki potensi pasir sungai dimana pasir sungai ini bisa di gunakan sebagai bahan bangunan, pasir sungai atau di sebut dengan sedimen

yang selama bertahun-tahun ini tidak dilakukan penyedotan sehingga terjadinya penebalan sedimen yang membuat sungai ini dangkal sehingga ketika terjadinya curah hujan yang besar membuat sungai mudah meluap, sungai tidak lagi mampu menahan debit air yang besar sehingga kemungkinan besar penyebab banjir tahunan ini disebabkan oleh pasir atau sedimen sungai yang sudah menebal sehingga menyebabkan kedangkalan sungai, BPBD berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan BNPB mereka berinisiatif untuk mengeksport pasir hingga ke Singapore namun pemerintah umum tidak memberikan izin akan tetapi pemerintahan umum Kabupaten Aceh Tamiang memiliki cara lain yaitu dengan menghubungi pihak BUMN untuk melakukan proses lanjut untuk mengurangi sedimen sungai yang sudah menebal sehingga membuat sungai ini dangkal dan mudah meluap.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang terjadi setiap tahun dalam penanggulangannya masih mendapat banyak keluhan, laporan dari masyarakat yang terkena dampak banjir. Bentuk penanggulangan yang dinilai belum maksimal, seperti misalnya logistik yang tersalurkan di Kecamatan Bendahara, bahkan terdapat satu kampung yang terletak di ujung Kecamatan Bendahara dimana bantuan logistik tidak tersalurkan hingga ke pada masyarakat desa tersebut, lambatnya petugas BPBD turun ke lokasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui call center BPBD untuk melakukan pelaporan langsung kepada pihak BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan untuk korban banjir, sumber (Metro Tv Minggu 16 November 2022).

Adapun wawancara dengan salah satu masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan Bahwa:

“ logistik tidak tersalurkan hingga ke tangan masyarakat yang terdampak banjir, hingga tidak ada nya stok obat-obatan dengan kondisi kampung yang terisolir dengan ketinggian air 100 samapai 150 meter, yang membuat kami tidak bisa keluar untuk membeli kebutuhan sehari hari.” (22 November 2022)

Dari hasil wawancara di atas bahwa, logistik belum berhasil disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Di kampung yang terisolasi dengan ketinggian air mencapai 100 hingga 150 meter, warga mengalami kesulitan mendapatkan stok obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, karena mereka tidak dapat keluar dari wilayah tersebut untuk berbelanja. Keterbatasan akses ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian segera. Wawancara dengan warga yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang (22 November 2022)

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana responsivitas badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa saja kendala badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Responsivitas badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang berfokus:
a) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, b) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, c) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, d) Semua keluhan masyarakat di respon oleh petugas.
2. Kendala badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui responsivitas badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang berfokus: a) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, d) Semua keluhan masyarakat di respon oleh petugas.
2. Untuk mengetahui kendala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Secara Akademik

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam

melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik .

1.5.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan/masukan/informasi bagi instansi, dan untuk mengetahui responsivitas badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, serta kendala apa saja yang di alami oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam hal pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan penanganan untuk meminimalisirkan bencana banjir kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang dan mendapat penanggulangan yang efisien.